

PEMBERDAYAAN PETANI SAWAH MELALUI KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN DI KABUPATEN MAROS

EMPOWERMENT OF SAWAH FARMERS THROUGH DEVELOPMENT AND ASSISTANCE ACTIVITIES IN MAROS REGENCY

Abdul Halim

Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan
abdulhalim@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan petani sawah melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan di Kabupaten Maros. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif, dengan instrumen utama penelitian adalah kuesioner. Responden penelitian adalah 380 orang yang diambil dengan teknik *stratified random sampling* dari populasi petani sawah yang terdaftar secara resmi di Kabupaten Maros. Data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya ditabulasi dan dikelompokkan untuk kepentingan pengolahan dan analisis data. Pemberdayaan petani sawah dianalisis berdasarkan pendekatan empat bina yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan petani sawah di Kabupaten Maros yaitu bina manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan dan pendampingan; bina lingkungan melalui pembinaan dan pendampingan dalam pengendalian OPT ramah lingkungan, serta bina usaha melalui pembinaan dan pendampingan dalam penerapan aplikasi teknologi produksi telah berjalan dengan baik, sedangkan bina usaha melalui pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan dan pemasaran hasil, serta bina kelembagaan melalui pembinaan dan pendampingan dalam penguatan kelompok tani belum berjalan dengan baik. Untuk itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang mendukung terlaksananya upaya pemberdayaan petani sawah khususnya dalam pengolahan dan pemasaran hasil serta penguatan kelompok tani.

Kata kunci: Pemberdayaan; petani sawah; pembinaan dan pendampingan.

ABSTRACT

The research objective was to analyze the empowerment of rice farmers through coaching and mentoring activities in Maros Regency. This type of research is quantitative research, with the main instrument being a questionnaire. The research respondents were 380 rice field farmers who were taken using stratified random sampling technique. The data obtained, tabulated and grouped for the purposes of data processing and analysis. Empowerment of paddy farmers is analyzed based on the four development approaches, namely human development, business development, environmental development, and institutional development. The results showed the empowerment of rice farmers in Maros Regency, namely human development through education and training as well as counseling and mentoring; environmental development through guidance and assistance in the control of environmentally friendly pests, as well as business development through coaching and assistance in the application of production technology applications, while business development through guidance and assistance in processing and marketing of products, and institutional development through guidance and assistance in the strengthening of farmer groups has not been going well. For this reason, policies are needed that support the empowerment of rice farmers, especially in the processing and marketing of products and strengthening farmer groups.

Key words: Empowerment; rice farmer; coaching and mentoring.

Pendahuluan

Sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan untuk mendukung pembangunan perekonomian di Kabupaten Maros. Hal ini sangat beralasan mengingat 15,25% produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Maros berasal dari sektor pertanian, berada pada urutan ketiga tertinggi dari 21 jenis lapangan usaha, dibawah sektor transportasi dan pergudangan (41,79%), serta sektor industri pengolahan (18,14%). PDRB Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 11.970.398,03 juta rupiah (BPS Maros, 2020).

Tidak kurang dari 32% penduduk yang sedang bekerja di Kabupaten Maros, memilih sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai sumber mata pencaharian utama, disamping pekerjaan lainnya di luar sektor pertanian. Artinya, sektor pertanian merupakan penyerap tenaga kerja terbesar (31,89%), diikuti sektor perdagangan (21,74%), sektor jasa kemasyarakatan (17,51%), industri pengolahan (12,90%), dan sektor-sektor lainnya (15,96%).

Pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Maros didukung oleh sumberdaya yang tersedia, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya buatan. Sebagian besar lahan di Kabupaten Maros digunakan untuk lahan pertanian, meliputi lahan pertanian sawah seluas 25.952 ha, lahan pertanian bukan sawah seluas 86.409 ha, dan lahan bukan pertanian seluas 49.551 ha (BPS Maros, 2016). Khusus lahan pertanian sawah, terdiri atas lahan sawah irigasi seluas 15.657 ha, dan lahan sawah non irigasi seluas 10.295 ha.

Ketersediaan sarana produksi benih di Kabupaten Maros disuplai oleh PT. Sang Hyang Seri (Persero) Kariango Maros. Selanjutnya, kebutuhan pupuk disuplai oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero). Di Kabupaten Maros juga terdapat lembaga penelitian tanaman pangan yang banyak membantu dalam perakitan

teknologi produksi, mulai dari pra panen sampai pasca panen. Tentunya, dukungan petani sawah yang sudah terbiasa berusahatani padi secara turun temurun merupakan faktor utama yang menunjang keberhasilan pengembangan padi di Kabupaten Maros.

Petani sawah (padi) di Kabupaten Maros berjumlah 33.382 jiwa (Kementan, 2020). Tingkat produktivitas petani dalam berusahatani padi cukup tinggi. Berdasarkan data BPS Maros (2020), produktivitas padi sawah di Kabupaten Maros pada 14 kecamatan berkisar antara 6,13-8,96 ton/ha. Tingkat produktivitas ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas padi sawah Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir (2011-2015) yaitu sebesar 5,07-5,24 ton/ha, dan produktivitas padi nasional sebesar 4,98-5,34 ton/ha (BPS, 2020).

Permasalahan utama yang dihadapi adalah produktivitas padi sawah yang cukup tinggi tersebut, belum dibarengi dengan peningkatan pendapatan petani sawah. Faktanya, kebanyakan petani sawah masih didera kemiskinan. Tercatat, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros dalam kurun waktu 3 tahun terakhir berturut-turut adalah tahun 2014 sebanyak 40.130 jiwa, tahun 2015 sebanyak 40.080 jiwa, dan tahun 2016 sebanyak 39.020 jiwa. Diyakini bahwa penduduk miskin ini didominasi petani sawah yang bermukim di pedesaan.

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pemberdayaan petani. Darwis dan Rusastra (2011) menyatakan program pemberdayaan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di pedesaan pada prinsipnya memiliki banyak persamaan, diantaranya adalah sama-sama berbasis desa, dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, mendapatkan modal usaha pertanian dan non pertanian, terbentuknya lembaga keuangan mikro di tingkat desa, serta dibimbing oleh penyuluh dan tenaga pendamping.

Hasil penelitian Irmayanti (2013) menunjukkan bahwa intervensi penyuluh pertanian dalam pemberdayaan sosial ekonomi

kelompok tani menjadikan perubahan sosial ekonomi petani berupa peningkatan produktivitas padi dari 3-5 ton/ha menjadi 7-9 ton/ha setelah adanya kegiatan penyuluhan. Sejalan dengan hasil penelitian ini, Laily *et al.* (2014) menyatakan pemberdayaan petani yang dilakukan menjadikan produksi padi semakin baik dan meningkat, ini dikarenakan tingkat pengetahuan dan ketrampilan petani dalam bercocok tanam semakin baik.

Menurut Sadjad (2000), selama ini program pemberdayaan petani secara ekonomi masih bersifat *on farm centralism*, semestinya pemberdayaan lebih diarahkan agar tumbuh rekayasa agribisnis sehingga petani bisa menjadi pelaku bisnis yang handal dan akhirnya bisa menjadi pusat bisnis masyarakat di pedesaan yang menyejahterakan. Pembangunan harus dari hilir yaitu pasar yang melalui komponen tengah ialah agroindustri, baru kemudian hulunya *on farm business*.

Kendala utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan yang berbasis pemberdayaan, diantaranya adalah belum siapnya sumberdaya manusia, baik karena kelemahan kemampuan maupun manajemen yang kurang mendukung (Syahyuti, 2007). Tentunya, diperlukan pembinaan dan pendampingan serta fasilitasi dari seluruh pemangku kepentingan terkait dengan kendala dimaksud. Oleh karena itu, Sumadyo (2001) mengemukakan dalam setiap pemberdayaan tidak terlepas dari tiga bina yaitu bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Selanjutnya, tiga bina ini oleh Mardikanto (2003) ditambahkan dengan bina kelembagaan.

Upaya pemberdayaan petani sawah di Kabupaten Maros dengan fokus kegiatan pembinaan dan pendampingan, selama ini belum banyak dikaji dan diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan petani sawah melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan di Kabupaten Maros”.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Simangunsong (2016), penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat deduktif, yakni dari khusus ke umum atau bersifat menggeneralisasi data-data yang didapatkan di lapangan kepada sebuah kesimpulan umum atau yang bergerak dari konsep/teori ke kondisi sebenarnya. Populasi penelitian adalah seluruh anggota kelompok tani yang terdaftar secara resmi dalam e-RDKK Kabupaten Maros khususnya anggota kelompok tani yang berusahatani tanaman pangan (padi), dalam hal ini jumlahnya 33.382 orang petani.

Ukuran sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan tabel penentuan jumlah sampel yang dikemukakan oleh Issac dan Michel (Silalahi, 2012; Sugiyono, 2007). Dengan menggunakan tabel tersebut, diperoleh ukuran sampel sebanyak 380 orang petani. Selanjutnya, teknik penarikan sampel penelitian dilakukan secara *stratified random sampling*. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner, dan dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi (Simangunsong, 2016; Bungin, 2010; Martono, 2010). Data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya ditabulasi dan dikelompokkan untuk kepentingan pengolahan dan analisis data.

Pemberdayaan petani sawah dianalisis berdasarkan pendekatan pemberdayaan dari Mardikanto (2003) dan Sumadyo (2001) yang menyatakan dalam setiap pemberdayaan tidak terlepas dari empat bina, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Adapun keempat bina tersebut, dianalisis lebih lanjut, berturut-turut yaitu: (a) analisis bina manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan dan pendampingan; (b) analisis bina usaha melalui pembinaan dan pendampingan dalam penerapan aplikasi teknologi produksi serta pengolahan dan pemasaran hasil; (c) analisis bina lingkungan melalui pembinaan dan pendampingan dalam pengendalian OPT ramah

lingkungan; serta (d) analisis bina kelembagaan melalui pembinaan dan pendampingan dalam penguatan kelompok tani.

Khusus untuk data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi, dianalisis lebih lanjut secara deskriptif untuk memperkaya dan memperdalam analisis data kuantitatif sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden Petani Sawah Berdasarkan Tingkat Produktivitas, Tingkat Pendapatan, dan Upaya Pemberdayaan

a) Tingkat Produktivitas Padi

Tingkat produktivitas padi petani sawah di Kabupaten Maros tergolong tinggi bila dibandingkan dengan capaian tingkat produktivitas padi skala Provinsi Sulawesi Selatan (5,07-5,24 ton/ha) dan skala nasional (4,98-5,34 ton/ha). Distribusi responden petani sawah berdasarkan tingkat produktivitas padi ditunjukkan pada Tabel 1.

Pada Tabel 1 tampak bahwa 46% responden petani sawah memiliki tingkat produktivitas padi di atas 6 ton/ha, sebanyak 44% responden petani sawah dengan tingkat produktivitas padi 4-6 ton/ha, dan hanya 10% responden petani sawah dengan tingkat produktivitas padi kurang dari 4 ton/ha.

Tabel 1. Distribusi Responden Petani Sawah Berdasarkan Produktivitas Padi di Kabupaten Maros

Produktivitas Padi (ton/ha)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
> 6	175	46
4 – 6	167	44
< 4	38	10
Jumlah	380	100

Sumber: Data Primer (diolah)

b) Tingkat Pendapatan Petani Sawah

Tingkat pendapatan petani sawah di Kabupaten Maros relatif masih rendah bila dibandingkan dengan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan (UMP) tahun 2017 yaitu sebesar Rp 2.435.625; per bulan. Distribusi responden petani sawah berdasarkan tingkat pendapatan ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Responden Petani Sawah Berdasarkan Tingkat Pendapatan di Kabupaten Maros

Tingkat Pendapatan (Juta Rp/bln)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
> 2,6	46	12
2,2 – 2,6	57	15
< 2,2	277	73
Jumlah	380	100

Sumber: Data Primer (diolah)

Pada Tabel 2 tampak bahwa kebanyakan responden petani sawah memiliki tingkat pendapatan yang rendah (kurang dari Rp 2,2 juta per bulan). Terdapat 73% responden petani sawah dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp 2,2 juta per bulan, dan hanya 12% responden petani sawah yang memiliki tingkat pendapatan lebih dari Rp 2,6 juta per bulan. Selebihnya yaitu 15% responden petani sawah memiliki tingkat pendapatan berkisar antara Rp 2,2 juta sampai Rp 2,6 juta per bulan.

Tentunya, untuk meningkatkan pendapatan petani sawah tersebut, diperlukan dukungan, bantuan, dan fasilitasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik dalam bentuk pembinaan dan pendampingan, maupun diterbitkannya kebijakan/regulasi yang mendukung dilakukannya upaya pemberdayaan petani khususnya petani sawah.

c) Upaya Pemberdayaan Petani Sawah

Dalam setiap pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan petani sawah, tidak

terlepas dari tiga upaya pokok, yang oleh Sumadyo (2001) disebut sebagai tribina, yaitu: (a) bina manusia; (b) bina usaha; serta (c) bina lingkungan, dan selanjutnya ketiga bina ini oleh Mardikanto (2003) ditambahkan dengan bina kelembagaan.

Bina Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Penyuluhan dan Pendampingan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani sawah maka diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Distribusi responden petani sawah berdasarkan keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Distribusi Responden Petani Sawah Berdasarkan Keikutsertaan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Kabupaten Maros

Keikutsertaan Kegiatan Diklat	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sering	49	13
Jarang	213	56
Tidak Pernah	118	31
Jumlah	380	100

Sumber: Data Primer (diolah)

Pada Tabel 3 tampak bahwa kebanyakan responden petani sawah jarang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yaitu sebesar 56%, hanya 13% yang termasuk kategori sering mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan bahkan terdapat 31% tidak pernah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya pada Tabel 4 tertera distribusi responden petani sawah berdasarkan keikutsertaan pada kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Tampak pada Tabel

4 bahwa sebagian besar responden petani sawah sering mengikuti kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Hal ini terkait dengan frekuensi kunjungan lapang yang dilakukan oleh penyuluh pertanian di wilayah kerjanya masing-masing di Kabupaten Maros.

Tabel 4. Distribusi Responden Petani Sawah Berdasarkan Keikutsertaan dalam Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan di Kabupaten Maros

Keikutsertaan Kegiatan Penyuluhan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Sering	231	61
Jarang	137	36
Tidak Pernah	12	3
Jumlah	380	100

Sumber: Data Primer (diolah)

Bina Usaha Melalui Pembinaan dan Pendampingan dalam Penerapan Aplikasi Teknologi Produksi serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pembinaan dan pendampingan dalam pemilihan komoditas merupakan salah satu upaya dalam rangka bina usaha bagi petani. Pada Tabel 5 ditunjukkan distribusi responden petani sawah berdasarkan pilihan varietas padi yang ditanam di Kabupaten Maros. Data menunjukkan 92% responden petani sawah telah memilih varietas unggul sesuai rekomendasi, dan hampir tidak ada lagi responden petani sawah yang menanam varietas produksi sendiri atau varietas asalan. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi bagi usahatannya.

Tabel 5 Distribusi Responden Petani Sawah Berdasarkan Varietas Padi yang Ditanam di Kabupaten Maros

Varietas Padi yang Ditanam	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Varietas unggul sesuai rekomendasi	349	92
Varietas unggul tidak sesuai rekomendasi	23	6
Varietas produksi sendiri (asalan)	6	2
Jumlah	380	100

Sumber: Data Primer (diolah)

Disamping pemilihan varietas, pembinaan dan pendampingan dalam aplikasi pemupukan juga sangat menentukan keberhasilan usahatani bagi petani sawah. Distribusi responden petani sawah berdasarkan aplikasi pemupukan di Kabupaten Maros ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Distribusi Responden Petani Sawah Berdasarkan Aplikasi Pemupukan di Kabupaten Maros

Aplikasi Pemupukan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Aplikasi pemupukan sesuai rekomendasi	156	41
Aplikasi pupuk tidak sesuai rekomendasi	224	59
Tidak melakukan aplikasi pemupukan	0	0
Jumlah	380	100

Sumber: Data Primer (diolah)

Pada Tabel 6 tampak bahwa tidak ada responden petani sawah yang tidak mengaplikasikan pemupukan, seluruhnya telah mengaplikasikan pemupukan. Hanya saja, masih terdapat 59% yang melakukan aplikasi pemupukan tetapi belum sesuai dengan yang direkomendasikan. Terdapat 41% telah

mengaplikasikan pemupukan dan sesuai dengan rekomendasi. Pemilihan varietas unggul dan aplikasi pemupukan sesuai rekomendasi sangat menentukan tingkat produktivitas petani di lapangan.

Pembinaan dan pendampingan dalam penanganan panen menentukan kualitas dan harga produksi yang dihasilkan oleh petani. Penanganan panen yang baik, kemudian diolah terlebih dahulu akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dibanding produksi tersebut langsung dijual, tanpa diolah terlebih dahulu. Distribusi responden petani sawah berdasarkan penanganan hasil panen di Kabupaten Maros ditunjukkan pada Tabel 7. Pada Tabel 7 tampak bahwa sebagian besar responden petani sawah tidak melakukan pengolahan hasil terlebih dahulu, sebelum dijual. Terdapat 94% responden petani sawah melakukan penanganan hasil panen dengan langsung menjual sebagian hasilnya (tidak diolah terlebih dahulu) dan sisanya disimpan kemudian diolah beberapa waktu kemudian. Hanya 4% yang mengolah produksinya terlebih dahulu sebelum dijual dan terdapat 2% responden petani sawah langsung menjual seluruh produksinya dalam bentuk gabah kering panen.

Tabel 7. Distribusi Responden Petani Sawah Berdasarkan Penanganan Hasil Panen di Kabupaten Maros

Penanganan Hasil Panen	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Diolah terlebih dahulu	15	4
Sebagian dijual, sebagian diolah	357	94
Langsung dijual, tidak diolah	8	2
Jumlah	380	100

Sumber: Data Primer (diolah)

Bina Lingkungan Melalui Pembinaan dan Pendampingan dalam Pengendalian OPT Ramah Lingkungan

Pembinaan dan pendampingan dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), salah satunya adalah melalui ketepatan waktu tanam sesuai rekomendasi. Ketepatan waktu tanam yang tepat ternyata dapat mengurangi serangan OPT. Artinya, dengan ketepatan waktu tanam menjadikan penggunaan pestisida dapat dikurangi, yang pada akhirnya dapat menunjang upaya pelestarian lingkungan. Dengan demikian, dapat dikatakan ketepatan waktu tanam merupakan salah satu upaya dalam rangka upaya bina lingkungan. Distribusi responden petani sawah berdasarkan ketepatan waktu tanam di Kabupaten Maros ditunjukkan pada Tabel 8.

Pada Tabel 8 tampak sebagian besar responden petani sawah telah menanam secara tepat waktu sesuai rekomendasi (88%). Sisanya 11% yang terlambat tanam 1-10 hari dan 1% terlambat tanam lebih 10 hari dari rekomendasi.

Tabel 8. Distribusi Responden Petani Sawah Berdasarkan Ketepatan Waktu Tanam di Kabupaten Maros

Ketepatan Waktu Tanam	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Waktu tanam tepat sesuai rekomendasi	334	88
Waktu tanam terlambat 1-10 hari dari rekomendasi	42	11
Waktu tanam terlambat >10 hari dari rekomendasi	4	1
Jumlah	380	100

Sumber: Data Primer (diolah)

Bina Kelembagaan Melalui Pembinaan dan Pendampingan dalam Penguatan Kelompok Tani

Bina kelembagaan salah satunya diupayakan melalui penguatan kelompok tani. Dalam rangka penguatan kelompok tani maka secara berkesinambungan setiap tahun dilakukan penilaian kelas kemampuan kelompok tani. Jumlah kelompok tani berdasarkan usia dan kelas kemampuan kelompok tani di Kabupaten Maros, keadaan sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Usia dan Kelas Kemampuan Kelompok Tani di Kabupaten Maros Tahun 2019

Usia Kelompok Tani (tahun)	Kelompok Tani			Jumlah	
	Lanjut	Madya	Utama		
Pemula					
> 10	195	355	111	6	667
5-10	137	4	1	0	143
< 5	122	7	3	0	131
Jumlah	454	366	115	6	941

Sumber: Data Primer (diolah)

Pada Tabel 9 tampak bahwa dari 667 kelompok tani yang berusia diatas 10 tahun, ternyata masih ada 195 kelompok tani

yang memiliki kelas kemampuan dengan kategori terendah yaitu kelas pemula. Hanya 355 kelompok tani yang meningkat kelas

kemampuannya menjadi kelas lanjut dan 111 kelompok tani meningkat menjadi kelas madya, serta 6 kelompok tani meningkat kelas kemampuannya menjadi kelas utama.

Khusus kelompok tani yang berusia 5-10 tahun dan dibawah 5 tahun, praktis pada umumnya masih berada pada kelas kemampuan terendah yaitu kelas pemula. Artinya, peningkatan kelas kemampuan kelompok tani di Kabupaten Maros belum berjalan sesuai yang diharapkan.

Analisis Pemberdayaan Petani Sawah Melalui Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan

a) Bina Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan serta Penyuluhan dan Pendampingan

Telah disadari bahwa bina manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap pemberdayaan masyarakat, tidak terkecuali petani sawah di Kabupaten Maros. Hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan manusia. Pemahaman ini terkait juga dengan posisi manusia yang unik. Dalam ilmu manajemen, selain sebagai salah satu sumberdaya, manusia juga sekaligus dipandang sebagai pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Artinya, semua upaya penguatan/pengembangan kapasitas, baik kapasitas individu, entitas, maupun pengembangan kapasitas sistem (jejaring) dapat dipandang sebagai upaya bina manusia.

Berdasarkan hal tersebut, di Kabupaten Maros, upaya bina manusia untuk petani sawah ditempuh salah satunya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Animo dan keikutsertaan petani sawah pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan belum menggembirakan. Pada Tabel 3 menunjukkan petani sawah yang sering mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan terdata hanya 13%, selebihnya 56% jarang, bahkan 31% belum

pernah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan petani sawah enggan atau kurang berminat mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan. Faktor pertama adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan umumnya dilaksanakan di kantor pemerintah atau di ruang pertemuan yang berada di ibukota provinsi atau ibukota kabupaten, yang letaknya jauh dari lokasi lahan usahatani petani. Kegiatan ini juga hanya dilaksanakan oleh instansi terkait secara berkala (1-2 kali setahun) dengan jumlah peserta sangat terbatas, menyesuaikan dengan ketersediaan dana dari pihak penyelenggara. Dengan kondisi demikian, petani biasanya hanya diwakili oleh pengurus kelompok tani yaitu ketua dan sekretaris, kadang ditambah bendahara.

Faktor kedua adalah format pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang terkesan sangat formal. Akibatnya, peserta kegiatan dalam hal ini petani menjadi kaku dan tidak bebas mengemukakan aspirasi dan pendapatnya, termasuk tidak bebas menyampaikan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Faktor lainnya adalah ketersediaan waktu bagi petani. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan jauh dari lokasi lahan usahatani petani, menyebabkan petani harus menyiapkan waktu khusus untuk kegiatan tersebut. Dikatakan waktu khusus karena pada saat pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (2-3 hari), praktis petani tidak memiliki kesempatan untuk mengelola usahatani. Petani tidak mengelola usahatani dengan baik, berarti hasil yang diperoleh tidak akan maksimal. Dengan ketiga faktor tersebut, keikutsertaan petani pada pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak begitu menggembirakan.

Disamping kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan lainnya yang dilakukan dalam rangka bina manusia bagi petani sawah di

Kabupaten Maros adalah kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Keikutsertaan petani pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan termasuk tinggi. Pada Tabel 4 tampak bahwa persentase jumlah petani sawah yang tergolong sering mengikuti kegiatan penyuluhan dan pendampingan adalah 61%, tergolong jarang 36%, dan tidak pernah 3%.

Kegiatan penyuluhan dan pendampingan merupakan tugas pokok dan dilaksanakan secara rutin oleh para penyuluh pertanian lapangan (PPL). PPL wajib dan harus aktif berkunjung ke lapangan menemui petani di wilayah kerjanya masing-masing. PPL secara rutin dan terus menerus berinteraksi dengan petani di lapangan. Dengan kondisi ini, tercipta suasana kekeluargaan, tidak ada jarak antara PPL dengan petani. PPL dapat menyampaikan inovasi teknologi terbaru kepada petani dengan mudah. Demikian pula, petani tanpa canggung dan kaku mengemukakan permasalahan yang dihadapi di lahan usahatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa bina manusia melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan telah berjalan dengan baik di Kabupaten Maros. Hal ini juga didukung dengan adanya stakeholder terkait, yang mendukung dari aspek perakitan teknologi dan pendampingan yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, serta Balai Penelitian Tanaman Pangan Kementerian Pertanian di Kabupaten Maros.

b) Bina Usaha Melalui Pembinaan dan Pendampingan dalam Penerapan Aplikasi Teknologi Produksi serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Bina usaha, meskipun telah dilakukan dengan baik, tanpa dibarengi dengan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi), tidak akan laku, bahkan bisa menambah kekecewaan. Sebaliknya, hanya bina usaha yang mampu (dalam waktu cepat)

memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat (Mardikanto, 2003).

Pemilihan komoditas misalnya, petani sawah di Kabupaten Maros telah menyadari sepenuhnya bahwa benih padi unggul bermutu dan sesuai rekomendasi akan memberikan hasil yang lebih baik dibanding benih padi biasa produksi petani sendiri (benih asalan). Fenomena ini tampak jelas pada Tabel 5. Pada Tabel 5 terlihat bahwa hanya 2% petani sawah di Kabupaten Maros yang menanam padi dengan menggunakan benih produksi petani sendiri (benih asalan). Tercatat 92% petani sawah menanam padi menggunakan benih unggul bermutu sesuai rekomendasi.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi pemupukan. Petani sawah di Kabupaten Maros telah paham dengan baik bahwa tanaman yang tidak dipupuk, tidak dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Dengan pemahaman demikian, hampir tidak ada lagi petani sawah di Kabupaten Maros yang tidak memupuk tanaman padi yang diusahakannya. Hanya saja karena faktor kecukupan dana, dan ketersediaan waktu yang lowong sehingga masih terdapat 59% petani sawah yang mengaplikasikan pemberian pupuk belum sesuai rekomendasi (Tabel 6). Dalam hal ini, pemupukan belum sesuai rekomendasi, bisa jadi karena pemberian pupuknya terlambat dari waktu yang seharusnya, jenis pupuk yang tidak lengkap, atau dosisnya tidak memenuhi takaran.

Penggunaan benih padi bermutu, kemudian diikuti dengan pemberian pupuk sesuai rekomendasi telah menghasilkan produktivitas padi yang cukup tinggi di Kabupaten Maros (Tabel 1). Pada Tabel 1 tampak produktivitas padi petani sawah kebanyakan berada pada kisaran di atas 6 ton per hektar (46%). Selebihnya, 44% berada pada kisaran 4-6 ton per hektar, dan hanya 10% petani sawah produktivitasnya dibawah 4 ton

per hektar. Artinya, bina usaha melalui aplikasi teknologi produksi telah berjalan dengan baik yang ditandai dengan capaian produktivitas cukup tinggi di Kabupaten Maros.

Namun, hal ini berbeda bila dilihat dari bina usaha melalui pengolahan dan pemasaran hasil. Pada umumnya petani sawah di Kabupaten Maros, begitu selesai panen, sebagian produksinya, bahkan ada yang seluruh produksinya, langsung dijual ke pedagang pengumpul dalam bentuk gabah kering panen. Produksi yang dijual tersebut, tidak diolah terlebih dahulu menjadi beras. Dengan kondisi ini, petani sawah tidak memperoleh nilai tambah (*added value*) dari usahataniya. Padahal, menurut Nuhung (2013), bila produksi gabah kering panen diolah terlebih dahulu, kemudian dijual, petani sawah akan mendapatkan tambahan pendapatan Rp 5.000/kg gabah yang diolah tersebut. Tentunya, terkait peningkatan pendapatan, upaya ini sangat penting bagi petani sawah.

Terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi petani sawah sehingga cara ini ditempuh meskipun tidak menguntungkan. Permasalahan pertama adalah ketidaktersediaan modal (simpanan/tabungan) untuk memenuhi kebutuhan dana selama proses produksi berlangsung (\pm 4 bulan). Untuk itu, petani sawah terpaksa berhutang atau meminjam uang ke pedagang atau pihak lain yang bersedia memberikan pinjaman. Dengan pertimbangan ini, petani sawah langsung menjual sebagian atau seluruh produksinya dan tidak diolah terlebih dahulu, untuk segera melunasi hutangnya.

Permasalahan kedua adalah terbatasnya prasarana dan sarana, baik peralatan pengeringan (*dryer*) maupun gudang penyimpanan hasil. Tanpa peralatan pengeringan, berarti petani sawah tergantung sepenuhnya pada penyinaran matahari. Begitu turun hujan, pengeringan gabah tidak bisa dilakukan. Bila kondisi ini berlangsung lama, kualitas gabah (hasil) akan turun drastis, yang akhirnya akan berdampak

pada turunnya harga penjualan dan pendapatan yang diterima petani sawah.

Permasalahan selanjutnya adalah kebutuhan dana yang mendesak dan tidak bisa ditunda, seperti biaya pendidikan bagi anak yang masih usia sekolah, serta biaya kesehatan bagi keluarga yang sedang dirawat dan mendapat pengobatan di rumah sakit atau puskesmas setempat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bina usaha melalui pengolahan dan pemasaran hasil di Kabupaten Maros belum tertangani dengan baik.

c) Bina Lingkungan Melalui Pembinaan dan Pendampingan dalam Pengendalian OPT Ramah Lingkungan

Sejak diperkenalkannya pembangunan berkelanjutan, isu lingkungan menjadi sangat penting. Hal ini dinilai penting karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan, disamping lingkungan sosial yang selama ini sering diabaikan.

Kearifan lokal berupa musyawarah tani “Tudang Sipulung” yang dilaksanakan secara turun-temurun setiap menjelang turun sawah memiliki andil yang cukup besar dalam upaya pelestarian lingkungan di Kabupaten Maros. Melalui musyawarah tani “Tudang Sipulung” yang dihadiri para pakar pertanian (baik dari balai penelitian, perguruan tinggi), ‘pallontara’ (tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan membaca tanda-tanda alam terkait iklim), kontak tani nelayan andalan (mewakili petani), stakeholder dan instansi terkait, serta pemerintah setempat, dihasilkan beberapa rekomendasi diantaranya waktu tanam serempak, dan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang patut diwaspadai menyerang areal pertanaman.

Dengan mekanisme ini, petani sawah sudah terbiasa menanam secara serempak. Kalaupun terdapat perbedaan waktu tanam,

deviasinya sedikit sekali yang lebih dari 10 hari. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa tanam serempak dalam hamparan yang luas, ternyata dapat mengurangi frekuensi dan intensitas serangan OPT. Serangan OPT yang tidak melampaui ambang batas, dengan sendirinya akan mengurangi pemakaian pestisida. Pemakaian pestisida yang kurang, tentunya akan berdampak baik bagi pelestarian lingkungan.

Keberadaan petugas pengamat OPT di Kabupaten Maros juga turut mendukung keberhasilan pengendalian OPT yang ramah lingkungan di daerah ini. Petugas OPT di Kabupaten Maros berjumlah 20 orang, dengan wilayah kerja meliputi seluruh areal pertanaman. Petugas pengamat OPT secara rutin memantau perkembangan dan serangan OPT di wilayah kerja masing-masing. Hasil pemantauan petugas OPT dijadikan dasar untuk menentukan serangan OPT sudah atau belum melewati ambang batas yang ditolerir. Artinya, penggunaan pestisida dilakukan secara terkendali sesuai kondisi di lapangan.

Kondisi ini secara langsung atau tidak langsung menunjukkan pelaksanaan bina lingkungan melalui pengendalian OPT ramah lingkungan telah berjalan dengan baik di Kabupaten Maros.

d) Bina Kelembagaan Melalui Pembinaan dan Pendampingan dalam Penguatan Kelompok tani

Keberhasilan bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan sangat ditentukan oleh efektivitas kelembagaan yang tersedia. Pengertian tentang kelembagaan seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai beragam bentuk lembaga (kelompok, organisasi). Tetapi, kelembagaan sebenarnya memiliki arti yang lebih luas, sebagaimana Syahyuti (2007) dalam Mardikanto dan Poerwoko (2017) menawarkan pentingnya 8 (delapan) kelembagaan dalam pengembangan agribisnis. Adapun kedelapan

kelembagaan dalam pengembangan agribisnis meliputi: (a) kelembagaan penyediaan input usahatani; (b) kelembagaan penyediaan permodalan; (c) kelembagaan pemenuhan tenaga kerja; (d) kelembagaan penyediaan lahan dan air irigasi; (e) kelembagaan usahatani; (f) kelembagaan pengolahan hasil pertanian; (g) kelembagaan pemasaran hasil; serta (h) kelembagaan penyediaan informasi (teknologi, pasar, dan lain-lain).

Kelompok tani merupakan kelembagaan yang melekat atau bahkan dapat dikatakan identik petani. Kelompok tani umumnya terdiri atas 20-30 orang anggota. Selanjutnya, beberapa kelompok tani bisa bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan). Kelembagaan kelompok tani ini, pengurusnya berasal dari petani, dikembangkan oleh petani, serta berjuang untuk petani (dari petani, oleh petani, dan untuk petani).

Tentunya, kepengurusan kelembagaan kelompok tani ini di bawah pembinaan dan bimbingan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sehari-hari oleh Dinas Pertanian setempat. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros (2018), jumlah kelompok tani di Kabupaten Maros sebanyak 941 kelompok tani. Bila dilihat dari tahun pembentukannya, ternyata 71% kelompok tani telah berusia > 10 tahun, selebihnya yaitu 15% berusia 5-10 tahun, dan 14% berusia < 5 tahun.

Pembagian kelas kemampuan kelompok tani di Kabupaten Maros terdiri atas 4 (empat) tingkatan, mulai dari tingkatan terendah sampai tingkatan tertinggi berturut-turut yaitu: (a) kelas kemampuan pemula; (b) kelas kemampuan lanjut; (c) kelas kemampuan madya; dan (d) kelas kemampuan utama. Meskipun beberapa kelompok tani telah berusia > 10 tahun, namun dari segi kelas kemampuan kelompok tani, ternyata 48% masih berada pada tingkatan terendah yaitu kelas pemula.

Terkait hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa kelas kemampuan kelompok tani di

Kabupaten Maros secara umum peningkatannya sangat lambat. Ketika dibentuk lebih dari 10 tahun lalu, kelas kemampuannya pemula sampai sekarang kelompok-tani tersebut tetap pemula, hanya sedikit kelompok-tani yang berhasil meningkat kelas kemampuannya (Tabel 9). Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan tidak meningkatnya kelas kemampuan kelompok-tani. Faktor pertama adalah belum optimalnya pembinaan dan pendampingan kelompok-tani oleh instansi yang berwenang. Akibatnya, kelas kemampuan kelompok-tani kebanyakan belum beranjak dari kondisi semula.

Padahal, menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, pada bagian lampiran dijelaskan bahwa penilaian kelas kemampuan kelompok-tani seharusnya dilaksanakan setiap tahun oleh penyuluh pertanian, dan dikukuhkan sesuai dengan jenjang klasifikasi kemampuan kelompok-tani yang bersangkutan. Pembinaan dan penilaian tersebut, tujuannya tidak lain adalah sebagai upaya peningkatan kemampuan kelompok-tani dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi kelompok-tani, baik sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, maupun sebagai unit produksi.

Faktor lain yang menyebabkan kelas kemampuan beberapa kelompok-tani tidak mengalami peningkatan sejak dibentuk adalah belum adanya konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi keberadaan kelompok-tani. Pembinaan, monitoring dan evaluasi kelompok-tani, biasanya intensif dilakukan ketika terdapat kegiatan yang mengharuskan keterlibatan dan partisipasi aktif dari kelompok-tani. Biasanya kegiatan ini diikuti dengan pembentukan kelembagaan baru yang bersifat *top down* (Bahrein, 2010), sehingga merusak tatanan kelembagaan yang sudah ada. Contoh kegiatan dimaksud adalah

pemberian bantuan, baik pemberian bantuan sarana produksi (benih, pupuk, alat-mesin pertanian) maupun pemberian bantuan modal yang langsung diberikan kepada petani melalui kelompoknya masing-masing.

Mekanisme penyaluran bantuan tersebut adalah harus melalui kelompok-tani, dan selanjutnya oleh pengurus kelompok-tani, bantuan ini diteruskan kepada anggotanya masing-masing (20-30 orang). Pemberian bantuan ini tidak boleh disalurkan tanpa melalui kelompok-tani. Dengan adanya ketentuan tersebut, instansi pelaksana kegiatan tentunya akan melakukan pembinaan dan monitoring secara intensif kepada kelompok-tani selaku pihak penerima manfaat. Kelemahan dari mekanisme ini adalah begitu kegiatan pemberian bantuan telah selesai dan terealisasi 100%, maka kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kelompok-tani juga ikut terhenti dengan alasan dana tidak tersedia. Artinya, pembinaan, monitoring, dan evaluasi kelompok-tani banyak tergantung kepada ada tidaknya bantuan.

Di sisi lain, anggota kelompok-tani aktif berkumpul dengan pengurusnya bila ada bantuan yang akan dibagi. Begitu bantuan telah diterima dan selanjutnya terbagi habis kepada seluruh anggota, maka kelompok-tani bersangkutan kemudian menjadi vakum. Kelompok-tani demikian, ada yang menyebutnya sebagai kelompok-tani 'semu'. Kelompok-tani ini muncul ketika ada bantuan, begitu bantuan telah habis, kelompok-tani ini juga ikut hilang. Kelompok-tani demikian selalu mengharapkan bantuan, akibatnya menjadi kelompok-tani yang tidak mandiri. Tidak mandiri berarti penguatan kelompok sulit tercipta

Terkait hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa bina kelembagaan melalui penguatan kelompok-tani di Kabupaten Maros belum berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan petani sawah di Kabupaten Maros yaitu bina manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan dan pendampingan; bina lingkungan melalui pembinaan dan pendampingan dalam pengendalian OPT ramah lingkungan, serta bina usaha melalui pembinaan dan pendampingan dalam aplikasi teknologi produksi telah berjalan dengan baik, sedangkan bina usaha melalui pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan dan pemasaran hasil, serta bina kelembagaan melalui pembinaan dan pendampingan dalam penguatan kelompok tani belum berjalan dengan baik.

Untuk itu, diperlukan kebijakan dan regulasi yang mendukung terlaksananya upaya pemberdayaan petani sawah khususnya dalam pengolahan dan pemasaran hasil serta penguatan kelompok tani.

Daftar Pustaka

- Bahreïn, S. 2010. Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 8(2): 133-149.
- BPS. 2020. Statistik Indonesia 2020 'Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan'. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS. 2019. Statistik Indonesia 2019. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS Maros. 2020. Kabupaten Maros Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Maros.
- BPS Maros. 2016. Statistik Penggunaan Lahan Kabupaten Maros 2015. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros.
- Bungin, B. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Darwis, V. dan I. W. Rusastra, 2011. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi Program PUAP dengan Desa Mandiri Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. 9(2), 125-142.
- Distan Maros. 2020. Laporan Pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Maros. Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Maros.
- Irmayanti. 2013. Intervensi penyuluh pertanian dalam pemberdayaan sosial ekonomi kelompok tani (Studi Kasus Kelompok Tani Cisadane Para Petani Sawah Lingkungan Talamangape Kelurahan Raya Kabupaten Maros). Skripsi. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Kasijadi, F., A. Suryadi, dan Suwono. 2003. Pemberdayaan petani lahan sawah melalui pengembangan kelompok tani dalam perspektif *Corporate Farming* di Jawa Timur. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*. Vol. 6(2): 117-130.
- Kementan. 2020. Rekap Kelompok Tani Per Wilayah, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros 2020. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Laily, S.F.R., H. Ribawanto, dan F. Nurani. 2014. Pemberdayaan petani dalam meningkatkan ketahanan pangan (Studi di Desa Betet, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 2(1): 147-153.
- Lowisada, S. A. 2014. Pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan usahatani bawang merah. Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang.
- Mardikanto, T., dan P. Soebiato. 2012. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Penerbit: Alfabeta, Bandung.